

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DAN HAJI KHUSUS

Oleh:
NUR ARIFIN
DIREKTUR BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

Santika Hotel, 23 Agustus 2021

DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

DASAR HUKUM

1. UU No.8 TAHUN 2019
Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

5. KMA No.5 tahun 2021
Tentang standar kegiatan usaha PPIU dan PIHK

2. UU NO. 11 TAHUN 2020
Tentang Cipta Kerja

6. KMA No.6 Tahun 2021
Tentang PPIU dan PIHK

• 3. PP No.5 Tahun 2021
• Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

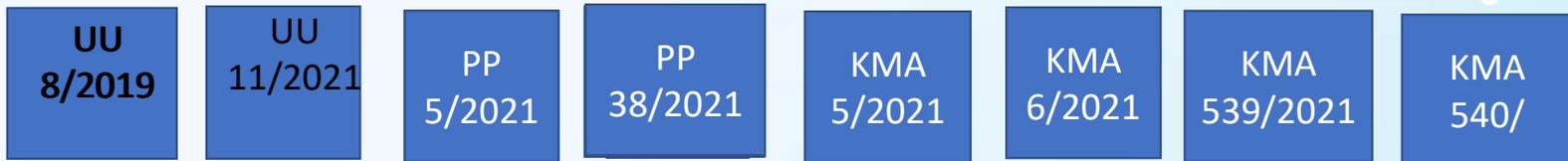
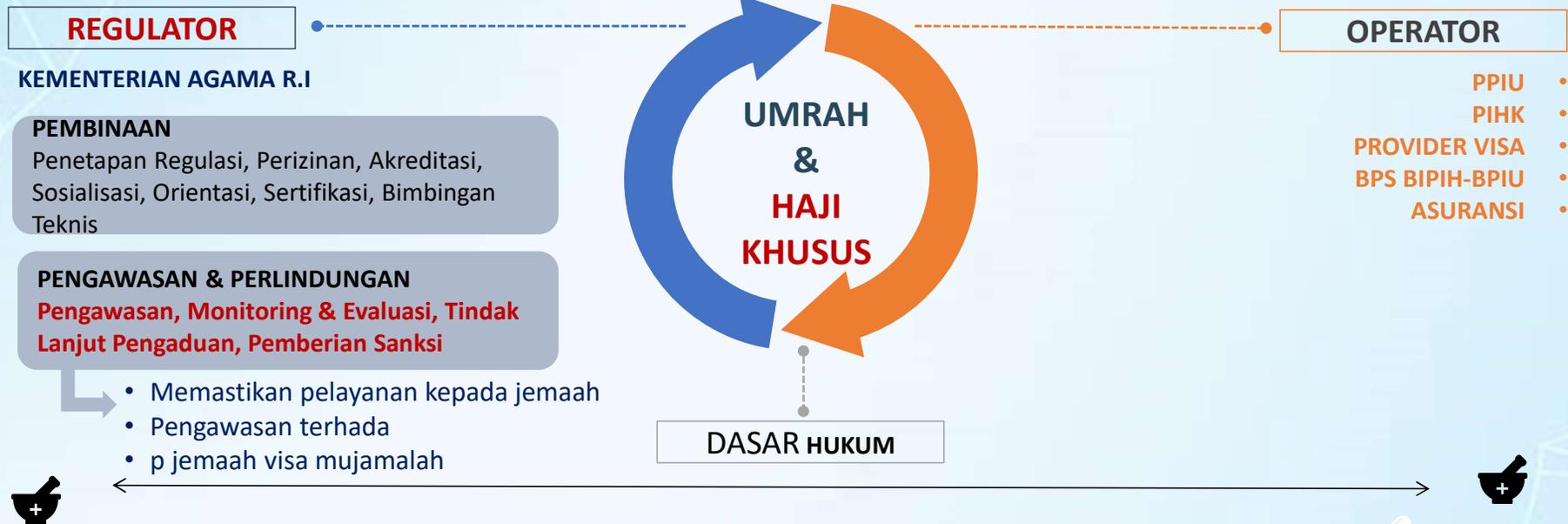
7. KMA NO 539 Tahun 2021
Tentang Penetapan besaran BG sebagai
persyaratan perizinan berusaha PPIU & PIHK

4. PP No. 38 Tahun 2021
Tentang Rekening Penampungan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Umrah

8. KMA NO.540 TAHUN 2021
Tentang Pedoman penerbitan surat
rekomendasi Kanwil bagi perizinan
PPIU

TUGAS & FUNGSI

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus

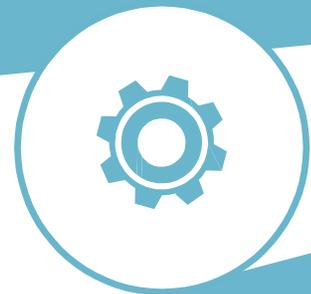


EKOSISTEM PENYELENGGARAAN UMRAH



AKREDITASI PPIU

Hasil
Akreditasi
Dipublikasikan



**Dilakukan
Setiap 5
tahun**



**Dilakukan oleh
Lembaga Akreditasi
yang terakreditasi
KAN dan ditunjuk
oleh Dirjen PHU**



**Hasil Penilaian
diberikan dalam
bentuk
Sertifikat**



Kriteria Penilaian akreditasi:

1. Administrasi
2. Manajemen dan kepatuhan
3. Finansial
4. Sarpras serta SDM
5. Kualitas Pelayanan

Daftar nama Lembaga akreditasi dapat dilihat dalam simpu.kemenag.go.id

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH



Menteri Agama menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman penetapan BPIU

Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal

Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis, Direktur Jenderal meminta penjelasan



BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH (BPIU) REFERENSI

Mulai April 2018, BPIU Referensi ditetapkan sebesar

RP. 20.000.000

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 221 Tahun 2018 tentang BPIU Referensi (dengan perhitungan jemaah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta)

Paling sedikit meliputi



Transportasi



Akomodasi



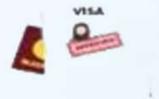
Bimbingan



Kesehatan



Perlindungan



Administrasi

-  Diterbitkan secara berkala.
-  Referensi bagi PPIU dalam penetapan harga paket umrah.
-  Referensi bagi masyarakat menimbang harga paket umrah yang ditawarkan PPIU.
-  Pedoman bagi Pemerintah dalam pengawasan.
-  Dihitung berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah.

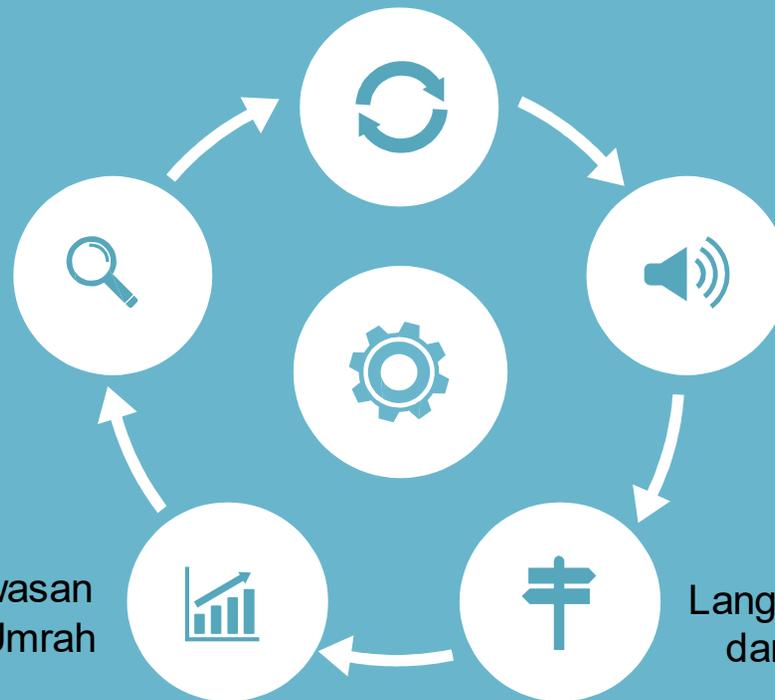
PENGAWASAN PPIU

Penguatan Koordinasi Stakholder

Sinergi Pengawasan Pusat dan Daerah

Secara terpadu dalam bentuk
Satgas pengawasan dan
Pencegahan Kasus Umrah
lintas Kementerian dan
lembaga terkait serta
Kepolisian

Melakukan pengawasan
berdasarkan SPM Umrah



Sosialisasi dan
penguatan
regulasi

Langkah Preventif
dan Represif

SISTEM KOMPUTER TERPADU UMRAH DAN HAJI SISKOPATUH

Siskopatuh hadir sebagai bentuk pelayanan, pembinaan dan perlindungan baik kepada jemaah maupun PPIU. Dengan sistem berbasis web, PPIU dapat melakukan pendaftaran, pembayaran hingga keberangkatan yang transparan dan akuntabel. Sehingga status jemaah terlindungi dengan Nomor Porsi Umrah yang dapat dicek di Umrah Cerdas.



PENDAFTARAN



PERIZINAN



AKREDITASI

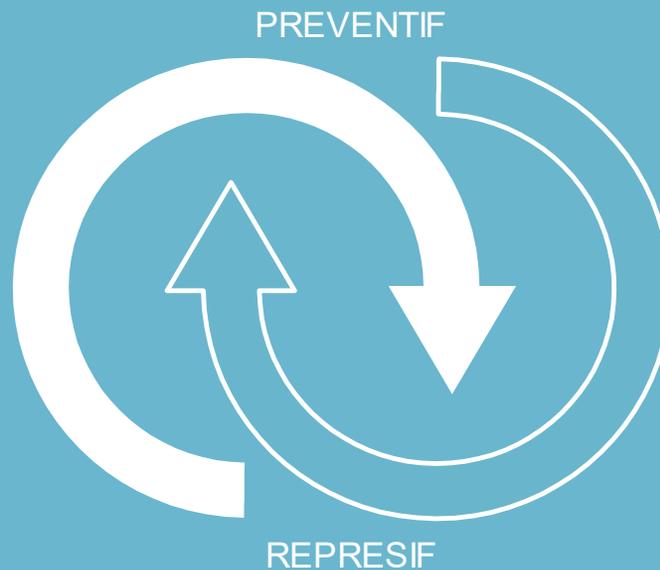


KEBERANGKATAN

UPAYA YANG DILAKUKAN

PREVENTIF

- Penyusunan dan penyempurnaan regulasi Umrah dan Haji Khusus.
- Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Umrah dan Haji Khusus
- Pengawasan Terpadu di Bandara Soetta dan Arab Saudi
- Pengawasan dan Pelaporan Online melalui SIS KOPATUH



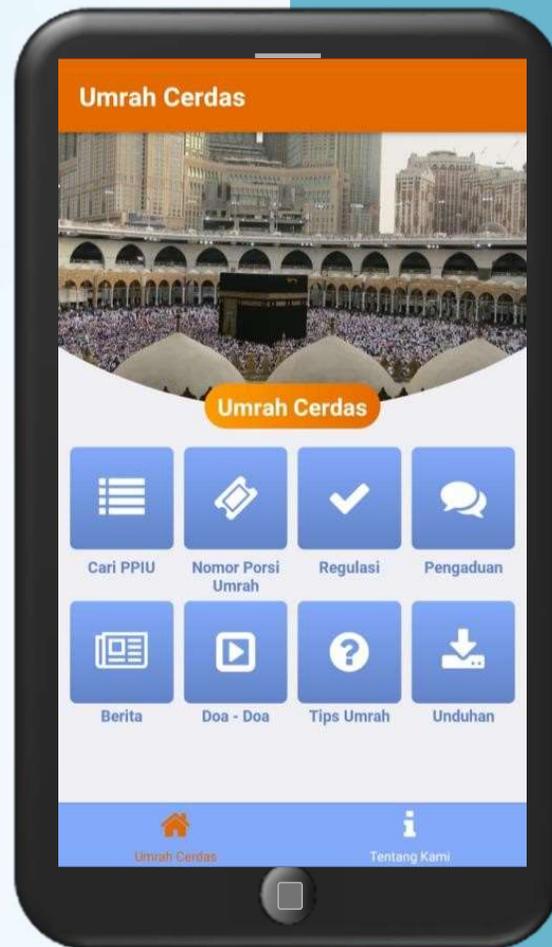
REPRESIF

- Pemanggilan untuk klarifikasi atas pengaduan/temuan hasil pengawasan di lapangan terhadap PPIU dan PIHK
- Peringatan kepada PPIU dan PIHK agar tidak mengulangi pelanggaran
- Pemberian sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan ijin, atau pencabutan ijin sesuai dengan tingkat pelanggaran

Aplikasi UMRAH CERDAS

Dapat diunduh di aplikasi
PLAYSTORE/Google Play

Aplikasi umrah cerdas hadir memberikan informasi kepada masyarakat untuk dapat memilih PPIU yang mempunyai izin operasional. Disamping itu, dengan beberapa fitur tambahan lainnya, calon jemaah dapat mengecek status keberangkatan serta memahami regulasi-regulasi terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.



Cari PPIU

Dimenu ini tersedia pencarian PPIU *terupdate* berdasarkan Nama dan Domisili.



Nomor Porsi Umrah

Bagi jemaah umrah yang sudah mendaftar dan membayar dapat mengecek status keberangkatannya di menu ini.



Regulasi

Peraturan-peraturan umrah terkait dan terbaru dapat diunduh di menu ini

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN

- 1. Pembukaan cabang melalui OSS
- 2. Pemahaman terhadap regulasi (banyak perubahan regulasi)
- 3. Pola Marketing (ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama)
- 4. Finansial (hampir 2 tahun tidak beroperasi)
- 5. Penelantaran Jemaah
- 6. ketidakpatuhan terhadap Regulasi

SOLUSI

- 1. Pembicaraan intensif dengan BKPM
- 2. Sosialisasi Regulasi /Pembinaan Terhadap PPIU
- 3. Pemahaman terhadap regulasi PPIU
- 4. PPIU harus tetap beroperasi pada saat izin keluar.
- 5. Sanksi yang tegas dari Kementerian
- 6. Perlu dilakukan pola pembinaan baik melalui sosialisasi , Diseminasi, Bintek dll

UMRAH 1443 H


DITJEN PHU
KEMENAG RI

Umrah 1443 H, Pemerintah dan Asosiasi Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19



“ Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih **memprioritaskan penanganan Covid-19 di dalam negeri** sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi.

Khoirizi H Dasir
Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

 informasi.haji@kemenag.go.id [@informasi_haji](https://twitter.com/informasi_haji) [@informasihaji](https://www.instagram.com/informasihaji) [Informasi Haji](https://www.facebook.com/informasihaji) [www.haji.kemenag.go.id](https://www.youtube.com/informasihaji)


DITJEN PHU
KEMENAG RI



"Upaya diplomasi, lobi, dan komunikasi terkait penyelenggaraan umrah terus dilakukan oleh pemerintah, baik Kemenag maupun Kemenlu. Terbaru, Kemenag juga telah bertemu Dubes Saudi di Jakarta untuk membahas persoalan ini."

 informasi.haji@kemenag.go.id [@informasi_haji](https://twitter.com/informasi_haji) [@informasihaji](https://www.instagram.com/informasihaji) [Informasi Haji](https://www.facebook.com/informasihaji) [www.haji.kemenag.go.id](https://www.youtube.com/informasihaji)



DITJEN PHU
KEMENAG RI

Kemenag juga menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU (Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri).

"Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas dimasyarakat dan media sosial."

Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah.

Perwakilan Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri mendukung keputusan pemerintah dalam menjaga keselamatan jemaah.



informasi.haji@kemenag.go.id



[@informasi_haji](https://twitter.com/@informasi_haji)



[@informasihaji](https://www.instagram.com/@informasihaji)



[Informasi Haji](https://www.facebook.com/InformasiHaji)



[Informasi Haji](https://www.youtube.com/InformasiHaji)

www.haji.kemenag.go.id

DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
TAHUN 2021

Terima Kasih

DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH